

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan menjadi tantangan besar karena dipengaruhi oleh berbagai persoalan, salah satunya adalah dampak dari krisis ekonomi. Soerjono Soekanto (2002) seorang sosiolog dan ahli hukum, mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan individu atau sekelompok individu tidak diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencakup terbatasnya akses terhadap sumber daya keuangan dan politik, barang dan jasa, serta kurangnya pengetahuan, keterampilan dan jaringan informasi yang tepat. Perspektif ini menekankan bahwa kemiskinan bukan sekedar permasalahan ekonomi, namun merupakan permasalahan struktural dan sosial yang kompleks. Tantangan dalam mengatasi masalah ini masih kompleks, meskipun pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program strategis untuk memerangi kemiskinan, seperti program sosial, penguatan ekonomi, dan perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Perbedaan wilayah, buruknya kualitas sumber daya manusia, dan akses yang tidak merata terhadap infrastruktur dasar adalah penyebabnya.

Akibat pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020, jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan.

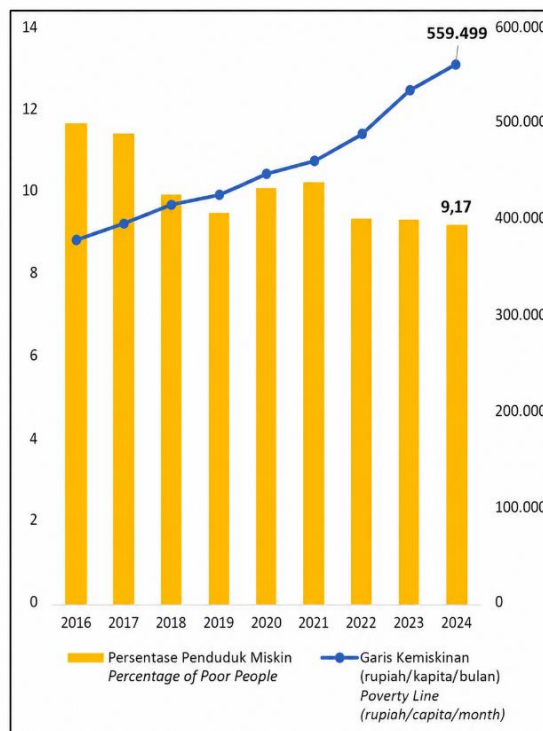
Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi dan upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif menghadapi hambatan yang signifikan. Malnutrisi, akses terbatas pada layanan kesehatan dan pendidikan, serta kehidupan tidak sehat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat yang berdampak luas pada pembangunan manusia (Mulyadi, 2017). Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk kejahatan, konflik, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Kemiskinan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan berkualitas.

Dalam tatanan pemerintahan yang adaptif dan inovatif, birokrasi memainkan peran sentral sebagai elemen kunci dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam implementasi program sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Birokrasi yang efektif seharusnya memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, koordinasi antar lembaga yang baik, serta pelayanan publik yang *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat, (Osborne & Gaebler, 1992). Namun, salah satu persoalan yang seringkali muncul pada pemerintahan adalah adanya *red tape* atau praktik birokrasi yang berbelit, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh regulasi yang tumpang tindih, kurangnya integrasi teknologi informasi, serta budaya organisasi yang cenderung hierarkis, yang pada akhirnya menimbulkan biaya oportunitas tinggi bagi program- program sosial (Bozeman, 2000). Implementasi kebijakan di daerah sering terkendala oleh

mekanisme birokrasi yang tidak efisien, termasuk koordinasi data antar lembaga, dan persyaratan administrasi yang tumpang tindih.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi (Susenas), persentase penduduk miskin di Kabupaten Pati selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, meskipun masih berada pada angka yang cukup signifikan. Adapun perkembangan persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Pati dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 1. 1 Grafik Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)**



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, garis kemiskinan di Kabupaten Pati mengalami peningkatan dari Rp 559.499 per kapita per bulan pada tahun 2024 menjadi Rp 598.600 per kapita per bulan pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat semakin tinggi. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 9,17 persen menjadi 8,24 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati masih mencapai 105,27 ribu jiwa pada tahun 2025. (BPS, 2025).

Untuk memerangi kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di masyarakat, pemerintah menjadi peran utama dalam kepentingan. Namun, masih adanya kemiskinan yang berkepanjangan menunjukkan adanya kegagalan dalam implementasi kebijakan sosial-ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin tidak hanya memicu ketidakpuasan tetapi juga melemahkan legitimasi negara. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Yanti & Adi (2020: 147-163) menjelaskan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas hidup anak.
2. Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program yang menunjang biaya Pendidikan anak dari keluarga miskin.

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program kesehatan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan lebih cepat, pemerintah Indonesia memulai Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. PKH dalam bahasa internasional disebut juga dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) merupakan program bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin (KM), sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH merupakan jenis jaminan sosial yang spesifik karena memberdayakan rumah tangga berpendapatan rendah sekaligus memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya terkait dengan kesehatan dan pendidikan (Alfiyaturrohmah & Setiawan, 2023). Namun, proses pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan tidaklah mudah dan memerlukan pendampingan termasuk keluarga penerima manfaat, serta itikad baik pemerintah sebagai faktor pendukung. Langkah utama pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meluncurkan Program keluarga Harapan (PKH). Tujuan jangka panjang pemerintah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengentaskan kemiskinan, serta mengubah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang masih belum memiliki komitmen cukup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Rukmana & Citra, 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program Keluarga

Harapan (PKH) sangat bergantung pada kualitas pengelolaan di tingkat daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Pati bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di daerahnya, melakukan evaluasi secara berkala, dan melakukan perbaikan apabila diperlukan. Hal ini penting agar Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terus membantu masyarakat kurang mampu.

Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, kebijakan pemerintah terhadap isu sosial-politik dapat berkontribusi pada terjadinya kemiskinan (Suryawati, 2005). Hal ini sesuai dengan pandangan para ahli teori bahwa suatu masyarakat atau bangsa menjadi miskin bukan karena masyarakat atau bangsa itu sendiri yang miskin, melainkan karena tindakan pemerintah yang buruk. Kebijakan pemerintah mempunyai peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun keberhasilan langkah-langkah tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk orientasi politik, prioritas pembangunan, dan kekuatan politik berbagai kelompok kepentingan. Mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang memerlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Stabilitas politik yang baik menciptakan investasi yang baik dan memfasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan pemerintah, orientasi politik, serta stabilitas politik yang mampu mendorong pelaksanaan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan. Supaya program yang bertujuan mengurangi

kemiskinan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai kebutuhan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya sangat diperlukan. Agar program pengentasan kemiskinan berhasil, peran akuntabilitas pemerintah sangat penting. Selain menyusun kebijakan yang tepat, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan dilaksanakan secara jujur dan terbuka. Bantuan sosial perlu diberikan kepada kelompok yang tepat untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Prosedur pemantauan yang ketat juga harus diterapkan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan keuangan dan menjamin bahwa setiap program berjalan sesuai dengan sasaran yang dicanangkan. Akuntabilitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memungkinkan inisiatif penanggulangan kemiskinan yang lebih berkelanjutan dan berhasil.

**Tabel 1. 1 Data Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota**

No	Nama Wilayah	Tahun Pendapatan				
		2023	2024	2025	2024	2025
1	Kota Semarang	642.456	671.936	709.785	4,59%	5,63%
2	Kota Tegal	623.617	664.922	702.113	6,62%	5,59%
3	Kota Surakarta	600.953	638.102	678.315	6,18%	6,30%
4	Kota Magelang	602.794	626.614	662.129	3,95%	5,67%
5	Kota Pekalongan	565.998	605.312	639.402	6,95%	5,63%
6	Kota Salatiga	565.031	596.659	630.119	5,60%	5,61%
7	<b>Pati</b>	<b>532.545</b>	<b>559.499</b>	<b>598.600</b>	5,06%	6,99%
8	Kudus	520.830	550.075	576.195	5,61%	4,75%
9	Brebes	513.339	542.495	563.762	5,68%	3,92%
10	Demak	511.145	535.134	569.035	4,69%	6,33%

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah serta persentase penduduk yang berada di

bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan, baik di tingkat Kabupaten maupun Kota, dari tahun 2023 hingga 2025. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BPS Kabupaten Pati pada tahun 2025, tingkat garis kemiskinan per kapita per bulan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kota Semarang memiliki garis kemiskinan tertinggi mencapai Rp 709.785 per kapita per bulan, sedangkan Kabupaten/Kota Demak memiliki garis kemiskinan terendah mencapai Rp 569.035 per kapita per bulan. Kabupaten Pati termasuk dalam kategori yang relatif rendah dengan nilai sebesar Rp 598.600 per kapita per bulan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, garis kemiskinan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sekitar Rp 39.101 per kapita per bulan atau sekitar 6,99%. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan kebutuhan minimum masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang mengindikasikan tekanan ekonomi yang masih dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam tabel data garis kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati menduduki peringkat ke-7 dan masuk dalam 10 besar garis kemiskinan. Di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Pati, permasalahan kemiskinan menarik perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang diterapkan, bencana alam, serta perubahan dalam struktur sosial. Berdasarkan data terakhir tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Pati pada bulan Maret mengalami penurunan

menjadi 105,3 ribu jiwa dibandingkan sebelumnya pada tahun 2024 yang berjumlah 116,8 ribu jiwa. Angka tersebut menunjukkan nilai yang masih sangat tinggi saat ini. Di kabupaten Pati, pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2025 menghadapi keterlambatan pada proses administratif dalam pelaksanaan program.

Kabupaten Pati dikenal dengan sebutan “Pati Bumi Mina Tani” serta memiliki visi “Berdaya, Upaya, Menuju Identitas Pati, Makmur, Ideal, Normatif, Adil, Tertib, Aman, Nyaman, Indah. Julukan tersebut mencerminkan dari visi dan semangat masyarakat Kabupaten Pati untuk menjadikan daerahnya sejahtera dan ideal. Meskipun julukan tersebut berasal dari filosofi kemakmuran yang berasal dari alamnya, nyatanya sebagian besar masyarakat Kabupaten Pati belum merasakan keadilan dari sisi ekonomi secara merata. Kabupaten Pati mempunyai banyak destinasi wisata budaya salah satunya yaitu batik bakaran yang juga terletak di Kecamatan Juwana. Namun, masih terdapat kendala oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya minat terhadap budaya lokal batik dan kurangnya informasi mengenai pemasaran batik tersebut, (Darma, 2020). Pemerintah daerah Kabupaten Pati belum sepenuhnya memanfaatkan potensi tersebut sehingga terdapat perbedaan antara produk ikan bandeng presto dan produk batik bakaran. Padahal, apabila pemerintah Kabupaten Pati dapat memanfaatkan potensi keduanya dan mampu bersaing di pasar, perekonomian Kabupaten Pati setidaknya akan mengalami kenaikan dan nantinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga disekitarnya.

Di antara sekian banyak Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kabupaten Pati dan Kota Semarang menarik perhatian sebagai perbandingan. Kota Semarang telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagai ibu kota provinsi. Kemajuan dalam sektor industri, jasa, dan perdagangan di perkotaan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, pertumbuhan yang pesat juga disertai dengan banyak tantangan, seperti kesenjangan sosial, kemacetan lalu lintas, dan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Semarang cenderung terkonsentrasi pada sektor informal dan kelas menengah ke bawah, sehingga gagal menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berpendapatan tinggi secara signifikan.

Kabupaten Pati memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Potensi sektor pertanian didukung oleh luas wilayah dan produktivitas yang tinggi. Mengingat letak geografis Kabupaten Pati yang berdekatan dengan laut, maka sektor perikanan juga menjanjikan seperti produk ikan bandeng presto. Karena bisnis tersebut, bandeng presto menjadi oleh-oleh khas daerah dan laku terjual di pasaran. Sehingga perekonomian wilayah Juwana perlahan berkembang di bidang perikanan hal ini disebabkan karena nelayan merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi PKH menghasilkan temuan yang beragam dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alfiyaturrohmah & Setiawan (2023) serta Najidah & Lestari (2019) menemukan bahwa PKH belum sepenuhnya efektif,

terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi, ketepatan sasaran, biaya, tujuan, dan layanan. Penelitian yang dilakukan oleh Arlina et al. (2021) juga menegaskan bahwa data penerima yang tidak diperbarui menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Di sisi lain, Majid & Zaerudin (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan pelaporan program masih lemah, sementara Ramzilah & Mahrijal (2021) serta Chasanah (2025) menemukan bahwa PKH berdampak pada kesejahteraan meskipun masih menghadapi berbagai kendala implementasi. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa permasalahan PKH masih berpusat pada aspek implementasi dan pengelolaan program.

Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek implementasi program, sehingga belum banyak mengkaji peran birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Kadir (2015) menunjukkan bahwa penerapan prinsip birokrasi Weber, seperti rasionalitas, hierarki, dan aturan formal, belum berjalan optimal karena adanya kepentingan pribadi dan lemahnya kontrol aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan publik tidak hanya terletak pada program, tetapi juga pada bagaimana birokrasi menjalankan perannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis peran birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati tahun 2025, dengan menelaah mekanisme birokrasi yang meliputi perencanaan, koordinasi pelaksana, sistem pendataan, serta pengawasan program dalam konteks kebijakan terbaru.

Penelitian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2025 dilakukan karena pada tahun tersebut telah tersedia Petunjuk Teknis (Juknis)

Pengelolaan PKH sebagai dasar operasional pelaksanaan program. Keberadaan Juknis ini memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan, pembagian tugas, serta tanggung jawab birokrasi, khususnya Dinas Sosial dalam mengelola program. Selain itu, Tahun 2025 merupakan periode pelaksanaan yang memiliki kejelasan regulatif yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji peran birokrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran birokrasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati Tahun 2025?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran birokrasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati pada tahun 2025 dengan menelaah peran, mekanisme kerja, serta penerapan aturan oleh aparatur pemerintah daerah.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kebijakan publik dan pembangunan sosial. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya literatur akademis serta diskusi mengenai pengelolaan program sosial di tingkat daerah. Teori-teori

yang ada tentang birokrasi dan *good governance* dapat diuji atau dikembangkan menggunakan hasil penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang mengangkat tema serupa, terutama yang berkaitan dengan program sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk mengevaluasi efektivitas program PKH yang telah berjalan dan mengidentifikasi daerah-daerah yang perlu diperbaiki. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program PKH di masa mendatang. Temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mendistribusikan dana program PKH secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya perbaikan pengelolaan program PKH, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti lain.

#### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mencegah plagiarisme karena peneliti menggunakan penelitian yang sebelumnya sebagai referensi untuk mendukung penelitian yang akan dibahas. Beberapa temuan penelitian sebelumnya antara lain: Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfiyaturrohmah dan Setiawan (2023)

dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2021”. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini untuk mengetahui dan memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan program PKH di Desa Ngagel. Pendekatan analisis digunakan untuk memahami hubungan antara fakta dan teori yang mendasari pelaksanaan PKH, hal tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat miskin. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan situasi aktual dan efektivitas program PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengambilan data, wawancara, dan observasi. Teori implementasi kebijakan Edward III (1980) menjadi landasan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Ngagel tidak mengalami penurunan akibat adanya Program Keluarga Harapan karena masyarakat belum diberdayakan secara ekonomi untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Najidah dan Lestari pada tahun (2019) melakukan penelitian yang dituangkan kedalam jurnal berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang”. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini adalah mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menilai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Berdasarkan temuan penelitian, Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Rowosari masih belum sepenuhnya efektif dalam ketepatan sasaran. Hal tersebut dikarenakan

masih terdapat permasalahan mengenai ketepatan sasaran, ketepatan biaya, ketepatan tujuan, dan ketepatan berpikir dalam pelaksanaannya. Faktor lain yang memengaruhi dalam penelitian ini yaitu belum adanya perencanaan dan belum berjalannya ketepatan layanan di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Arlina *et.al* (2021) dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone” bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di bidang Pendidikan, di Desa Lilirawang. Penelitian ini berfokus pada masalah implementasi program yang dinilai kurang berjalan dengan baik di wilayah tersebut. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berbentuk studi kasus. Lokasi penelitian berada di Desa Lilirawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tempat diterapkannya PKH. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator, yaitu keadaan lingkungan, interaksi antar organisasi, serta karakteristik dan kemampuan pendamping pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Lilirawang belum berjalan maksimal. Dari empat indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan, hanya satu yang berhasil dilaksanakan dengan baik. Salah satu penyebab utama yang menghambat keberhasilan implementasi PKH adalah penggunaan data penerima yang sudah lama dan tidak

diperbarui. Hal ini berakibat pada ketidaksesuaian antara kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima dengan data yang ada, sehingga banyak sasaran yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PKH. Namun, meskipun terdapat kendala dalam pengimplementasian program ini, terdapat beberapa faktor pendukung yang membantu pelaksanaan PKH di Desa Liliawang. Percepatan pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh dukungan dari berbagai pihak dan lembaga terkait, penyaluran bantuan secara tepat waktu, serta dedikasi para pelaksana PKH dalam mengupayakan hasil terbaik. Meskipun demikian, faktor penghambat utama tetap terletak pada penggunaan data lama yang tidak mencerminkan kondisi masyarakat saat ini, yang mengakibatkan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan pentingnya pembaruan data penerima PKH agar program tersebut dapat lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di bidang Pendidikan, di Desa Liliawang.

Abdul Majid dan Zaerudin (2023) melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Buton Selatan” bertujuan untuk menggambarkan transparansi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Desa Lipu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini mengungkapkan adanya beberapa kendala yang signifikan terkait dengan transparansi dalam pengelolaan PKH di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara

langsung kepada informan berdasarkan sampel yang telah ditargetkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan PKH di Desa Lipu masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Salah satu masalah utama adalah kurangnya akses terhadap informasi mengenai program PKH, seperti jadwal penerimaan bantuan, pengurangan atau penambahan anggota peserta penerima, dan penyaluran bantuan itu sendiri. Selain itu, informasi yang disebar oleh pemerintah desa sangat terbatas, disampaikan hanya melalui satu pihak, dan tidak sampai kepada masyarakat secara menyeluruh. Hal ini membuat proses pengelolaan PKH menjadi kurang transparan, karena penerima bantuan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program tersebut. Lebih lanjut, kurangnya laporan berkala yang disertai dengan dokumen resmi menyebabkan masalah yang ada tidak pernah mendapatkan tindak lanjut. Banyak laporan yang vakum dan tidak ada tindakan konkret untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, hubungan antara pendamping dengan pihak desa serta penerima PKH tidak terjalin dengan baik. Pendamping PKH dan penerima bantuan tidak melaporkan jumlah peserta atau kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak desa, yang semakin memperburuk tingkat transparansi dalam pengelolaan program tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan bahwa transparansi dalam pengelolaan PKH di Desa Lipu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan masih sangat kurang, dan membutuhkan perbaikan dalam hal akses informasi, komunikasi antar pihak terkait, serta pelaporan yang lebih sistematis dan terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Chasanah (2025) dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang” bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mengidentifikasi kendala dalam proses validasi data dan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kenanga, Kota Tangerang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa individu atau kelompok dianggap miskin jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, mengakses layanan kesehatan dan Pendidikan, sehingga kesejahteraan hidup mereka terganggu. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah Kota Tangerang melaksanakan PKH sebagai bentuk bantuan sosial bagi keluarga miskin dan diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan yang telah dipilih dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Kenanga telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah adanya perubahan sistem baru yang menghubungkan proses pelaksanaan PKH langsung dengan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) dan DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH yang ada. Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan

Kenanga tergolong pada kategori Keluarga Sejahtera III, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat telah merasakan peningkatan dalam taraf hidup mereka. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas program ini. Salah satunya adalah tidak adanya pertemuan awal dan validasi data terhadap calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh pendamping PKH sebelum mereka terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal kemandirian dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), banyak penerima bantuan yang kurang memiliki inisiatif dan tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai peserta PKH, seperti memenuhi syarat Pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan oleh program. Secara keseluruhan, meskipun pelaksanaan PKH di Kelurahan Kenanga sudah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga, namun masih diperlukan perbaikan, terutama dalam hal pengelolaan data, verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan penguatan peran pendamping untuk memastikan keberhasilan program ini lebih maksimal.

Penelitian yang dilakukan Kadir (2015) yang berjudul “Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara” menggunakan metode kualitatif untuk membahas secara mendalam terkait praktik birokrasi di lingkungan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip birokrasi Weber seperti rasionalitas, hierarki kewenangan, dan aturan formal telah diupayakan dalam sistem pemerintahan daerah, namun belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih

adanya pengaruh kepentingan pribadi serta lemahnya kontrol terhadap aparatur birokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramzilah & Mahrizal (2021) dengan judul “Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie” bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kemiskinan merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi individu, baik dari segi moral maupun psikologi, serta berdampak pada pertumbuhan suatu negara. Sejak Indonesia Merdeka pada tahun 1945, pemerintah telah berupaya keras untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai program, termasuk PKH yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PKH di Kecamatan Indrajaya telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kualitas hidup, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi upaya bantuan langsung dari pemerintah. Dengan bantuan ini, diharapkan keluarga miskin dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, meskipun program PKH dianggap efektif dalam beberapa aspek, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama yang

diidentifikasi adalah ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan. Beberapa keluarga yang menerima bantuan ternyata tidak sesuai sepenuhnya mencapai targetnya. Selain itu, penggunaan dana PKH oleh penerima manfaat juga menjadi masalah. Sejumlah peserta memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan yang tidak sejalan dengan tujuan program, seperti membeli perabotan rumah tangga, alih-alih memanfaatkannya untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemangku kepentingan, terutama petugas PKH, lebih hati-hati dalam memilih dan memverifikasi penerima bantuan. Pemantauan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana juga sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan program PKH diharapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Indrajaya.

Dari ke tujuh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfiyaturrohmah dan Setiawan, Najidah dan Lestari, Arlina, Muhammad Guntur dan Umar Nain, Abdul Majid dan Zaerudin, Ramzifah, Kadir dan Mahrizal difokuskan untuk menganalisis efektivitas program keluarga harapan (PKH) mengutamakan pada evaluasi implementasi program yang berdampak pada keluarga penerima manfaat, dan strategi pengelolaan yang efisien dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Persamaan utama dari ke tujuh penelitian ini terletak pada upaya mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan program serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan programnya. Perbedaan dari penelitian-penelitian ini terdapat pada landasan teori, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori birokrasi dan

*good governance*. Dengan demikian, perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis terletak pada landasan teori dan pembahasannya dalam keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pati belum sepenuhnya diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulis berpikir bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

## **1.6. Landasan Teori**

### **1.6.1. Teori Birokrasi**

Birokrasi menurut Weber (1947) merupakan suatu sistem yang bersifat rasional, impersonal, dan hierarkis, yang bertujuan menciptakan efisiensi, keteraturan, serta prediktabilitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Menurut Weber, sistem birokrasi menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan harus berlandaskan pada aturan yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur dengan baik, serta susunan organisasi yang jelas.

Konsep birokrasi menurut Max Weber dikembangkan dari sejumlah prinsip dan analogi yang menjadi dasar pemikirannya mengenai bentuk organisasi modern yang ideal. Weber (1947) dalam karyanya *The Theory of Social and Economic Organization* membedakan dua tipe utama birokrasi, yaitu birokrasi patrimonial dan birokrasi rasional-legal. Birokrasi patrimonial umumnya bersifat personal dan emosional, pejabat diangkat berdasarkan kedekatan atau loyalitas kepada pimpinan, bukan karena kemampuan profesional. Sementara itu, birokrasi rasional-legal

menekankan objektivitas dan profesionalisme, dengan pengisian jabatan yang dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, sistem merit, serta aturan formal yang sudah ditetapkan sebelum seseorang menempati posisi dalam pemerintahan (Weber, 1978). Weber menegaskan bahwa pejabat dalam sistem birokrasi memiliki peran sosial yang signifikan dalam menjalankan fungsi administrasi publik. Max Weber (1947) berpendapat bahwa terdapat beberapa karakteristik penting yang saling berkaitan dalam pelaksanaan peran tersebut, yaitu:

1. Pejabat memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukannya dalam struktur organisasi.
2. Segala sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut disediakan oleh institusi atau otoritas yang berwenang, bukan oleh individu pejabat itu sendiri.

Setelah menjelaskan karakteristik birokrasi ideal menurut Weber (1947), perlu dipahami bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sistem birokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep ideal tersebut. Penerapan aturan serta prosedur administratif yang sangat ketat terkadang justru menimbulkan hambatan dalam proses pelayanan dan pelaksanaan kebijakan. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah *Red Tape*, yang menggambarkan kondisi birokrasi yang cenderung berbelit-belit akibat banyaknya aturan dan prosedur formal yang harus dipenuhi.

Istilah *Red tape* merujuk pada keberadaan aturan dan prosedur formal yang dinilai berlebihan, kaku, serta tidak efisien, sehingga berpotensi menghambat

proses tindakan maupun pengambilan keputusan. Fenomena ini umumnya tercermin dalam praktik birokrasi yang menuntut pengisian berbagai dokumen, pengurusan izin, persetujuan berlapis dari sejumlah pihak atau komite, serta penerapan aturan administratif tingkat rendah yang memperlambat dan mempersulit pelaksanaan suatu urusan. Birokrasi sebagai salah satu pilar utama dalam organisasi pemerintahan dan administrasi publik, merujuk pada sistem struktur organisasi yang dirancang secara rasional.

*Redtape* telah lama menjadi objek kajian para ahli administrasi publik sebagai salah satu bentuk patologi birokrasi. Dalam penelitian-penelitian terdahulu, *red tape* sering dipandang sebagai fenomena yang muncul pada tingkat individu, sebagaimana dijelaskan dalam teori klasik Merton (1940) tentang pergeseran tujuan, yaitu ketika pelaksanaan aturan menjadi tujuan utama dan mengabaikan substansi kebijakan. Waldo (1946) menambahkan bahwa perilaku *red tape* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat berkembang menjadi bagian dari sistem yang memengaruhi aktor-aktor lain di dalam organisasi. Bozeman dan Feeney (2011) menegaskan bahwa *red tape* seringkali digunakan sebagai istilah yang identik dengan prosedur, aturan, dan regulasi yang menyimpang dari fungsinya. Aturan-aturan tersebut diterapkan secara berlebihan, kaku, dan berbelit-belit. Secara umum, terdapat lima bentuk utama *red tape* yang sering terjadi, yaitu:

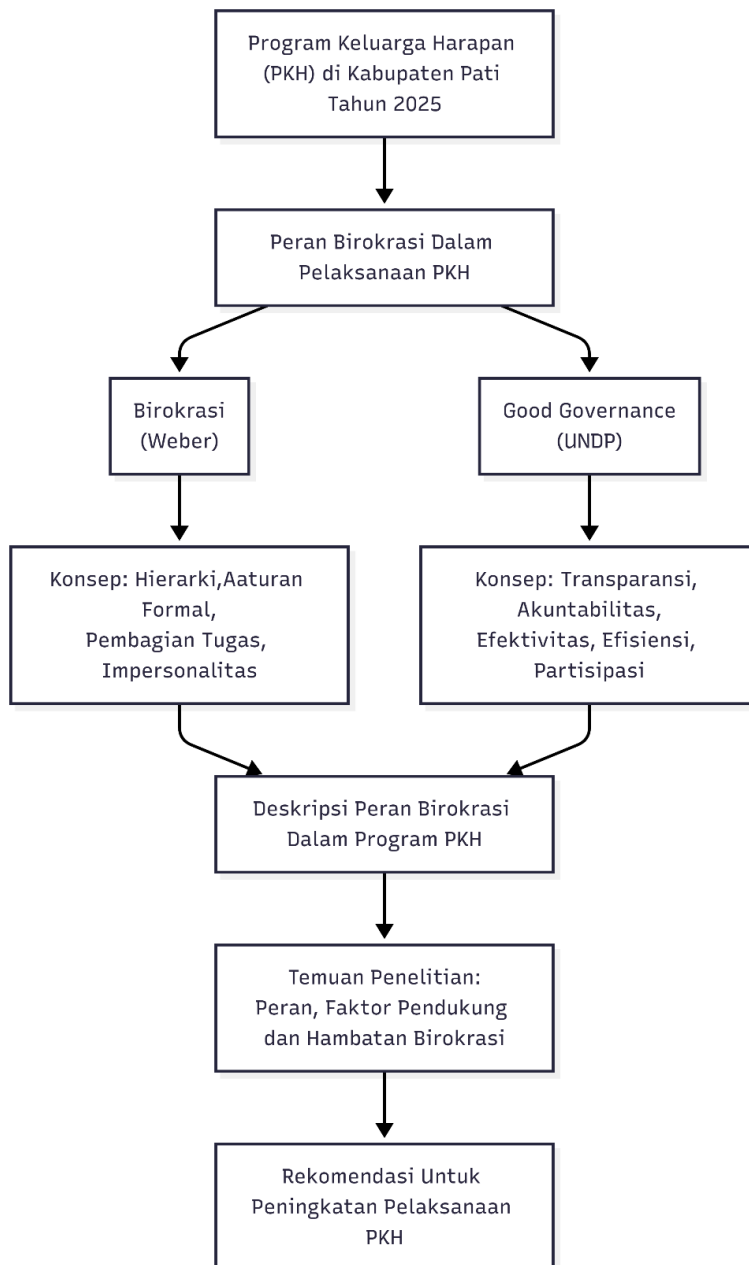
1. Persyaratan yang banyak, kurang relevan dan ketat
2. Struktur dan hierarki yang panjang, ketat, dan berlebihan
3. Prosedur atau tahapan yang rinci, kompleks, panjang dan ketaatan secara

berlebihan, serta berbelit-belit

4. Waktu yang lebih lama dari ketentuan, biaya yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan.
5. Sikap dan perilaku petugas yang suka menunda dan acuh tak acuh, mendahulukan keluarga, sahabat, dan kroni-kroninya dengan mengharapkan imbalan sehingga kurang menghargai masyarakat.

## 1.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diperlukan untuk memperjelas sistematika berpikir dalam penelitian, yang dirangkum dalam skema berikut:



## 1.8. Operasionalisasi Konsep

Untuk memperjelas batasan konsep yang digunakan dalam penelitian serta memudahkan proses pengumpulan data di lapangan, maka konsep-konsep yang digunakan perlu dioperasionalkan ke dalam indikator yang lebih terukur. Operasionalisasi konsep dilakukan dengan mengacu pada teori birokrasi yang dijelaskan oleh Max Weber yang menekankan karakteristik organisasi birokrasi seperti adanya hierarki kewenangan, aturan formal, pembagian tugas yang jelas, serta prinsip impersonalitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati. Melalui operasionalisasi konsep ini, setiap konsep utama dalam penelitian dijabarkan ke dalam indikator dan sub indikator yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan *instrument* penelitian, khususnya dalam proses wawancara dan pengumpulan data di lapangan. Rincian operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Tabel Konseptual**

<b>Teori</b>	<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
Birokrasi oleh Weber (1947)	Hierarki	Kejelasan Peran Pelaksana PKH	Mengukur sejauh mana birokrasi dalam pembagian tugas. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian tugas antar pelaksana PKH.</li> <li>2. Struktur Dinas Sosial P3AKB.</li> <li>3. Kesesuaian tugas dengan fungsi.</li> </ol>

		Sistem Pelaporan	1. Mekansime laporan kegiatan.
	Aturan Formal dan Legalitas	SOP PKH	Mengukur birokrasi dalam pengelolaan PKH kepada pemerintah dan masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan SOP di lapangan.</li> <li>2. Kesesuaian pelaksana dengan regulasi.</li> <li>3. Hambatan penerapan aturan.</li> </ol>
	Impersonalitas	Objektivitas	Mengukur ketepatan peran birokrasi PKH dalam penentuan sasaran dan pelaksanaan program. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlakuan sama kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).</li> <li>2. Tidak diskriminatif.</li> </ol>
	Administrasi	Sistem Data & Laporan	Mengukur sejauh mana birokrasi pemerintah daerah mampu memastikan keakuratan dan ketepatan data penerima program. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).</li> <li>2. Pemutakhiran Data.</li> </ol>

## **1.9. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D mendefinisikan metode penelitian menjadi upaya untuk menguji dan menemukan kebenaran berdasarkan kenyataan yang diteliti melalui cara-cara ilmiah yang bersifat sistematis, realitas, dan rasional. Pendekatan sistematis mengacu pada penelitian yang dilakukan melalui langkah-langkah terstruktur secara sinkron sesuai dengan alur penelitian, sehingga memudahkan pemahaman dan pengelolaan penelitian. Di sisi lain, pendekatan realitas menekankan bahwa penelitian didasarkan pada data konkret yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian tentang strategi pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten PATI pada Tahun 2025 dilakukan untuk menguji kebenaran efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam pengelolaan program. Penelitian ini akan memanfaatkan pendekatan sistematis untuk menyusun tahapan penelitian yang jelas dan terukur. Pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data lapangan terkait implementasi PKH, serta pendekatan rasional untuk menganalisis strategi pengelolaan berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pati pada tahun mendatang.

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan faktual. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang didasarkan pada filsafat post-positivisme dan didasarkan pada kemampuan penalaran peneliti untuk menghubungkan data, informasi, fakta, dan interpretasi berdasarkan perumusan tujuan. Penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati Tahun 2025” akan menjelaskan bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati dikelola serta proses, tantangan, dan keberhasilannya pada tahun 2025. Selain itu, pemahaman menyeluruh tentang strategi pengelolaan PKH, termasuk inovasi yang diterapkan dan respons masyarakat.

### **1.9.2. Situs Penelitian**

Menurut pendapat Moleong (2011), penentuan situs penelitian sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terarah. Langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi: mempelajari fokus penelitian dan merumuskan masalah secara jelas, membandingkan kesesuaian antara permasalahan yang diidentifikasi dengan kondisi nyata di lapangan, serta mempertimbangkan relevansi teori yang mendasari penelitian tersebut. Situs penelitian dalam konteks ini, mengacu pada lokasi atau tempat di mana proses pengumpulan data dilakukan. Lokasi Kabupaten Pati dipilih dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dan

mendalam, yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.

### **1.9.3. Subjek Penelitian**

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa informan yang dituju harus memahami dan memiliki hubungan dengan topik penelitian agar peneliti dapat memperoleh data penting dan menghasilkan hasil yang representatif. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball* sampling yaitu dengan menentukan informan sebelumnya. Informan yang terlibat meliputi Dinas Sosial P3AKB serta Keluarga Penerima Manfaat yang dianggap memiliki otoritas dan pengetahuan yang luas terkait pelaksanaan PKH.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas terhadap informan yang lebih terbuka sehingga memudahkan proses penggalian data secara mendalam. Selain itu, Kecamatan gabus memiliki jumlah penduduk sebesar 64.904 jiwa. Jumlah ini menunjukkan skala wilayah yang cukup signifikan dalam pelaksanaan PKH. Selain itu, karakteristik wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian, khususnya potensi lahan persawahan, mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rentan terhadap kemiskinan. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Gabus relevan sebagai lokasi khusus peneliti untuk mengkaji PKH.

### **1.9.4. Jenis atau Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk menganalisis informasi

dengan mengembangkan konsep teori yang telah ditentukan dan mengamati fenomena atau gejala sosial. Jenis data ini bersifat deskriptif, sehingga hasilnya dijelaskan dalam kalimat-kalimat yang menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data memiliki beragam jenis dan posisi yang berbeda. Mulai dari yang paling jelas dan terlihat hingga yang lebih samar, serta dari data primer hingga sekunder.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada sumber data yang berisi informasi utama yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, seperti melalui wawancara dengan narasumber atau *informant* dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, Pendamping Program, dan Masyarakat Penerima Manfaat.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui sumber yang telah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Biasanya, sumber data sekunder digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian, namun bisa juga digunakan sebagai sumber utama jika tidak ada narasumber yang tersedia.

### **1.9.5. Teknik Pengumpulan Data**

Menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen sebagai sumber data utama. Teknik ini didukung oleh pendapat Patton

(2002), yang menyatakan bahwa metode triangulasi penting untuk meningkatkan validitas data. Sedangkan untuk analisis data, data dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau tema yang relevan dari data yang telah dikumpulkan.

1. Observasi

Teknik observasi memungkinkan peneliti secara sistematis mengamati fenomena langsung di lapangan dan merekam kegiatan. Dalam metode observasi, peneliti secara langsung melihat aktivitas PKH seperti pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan bantuan tanpa mengubah fakta.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk tujuan tertentu. Pewawancara mengajukan pertanyaan, dan narasumber bertindak sebagai pihak yang menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati. Peneliti terlebih dahulu menghubungi informan untuk meminta ketersediaan menjadi narasumber dan menentukan waktu serta tempat wawancara. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian mengenai peran birokrasi dalam PKH. Selama proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dan

menggali informasi lebih lanjut melalui pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban yang diberikan. Hasil wawancara kemudian dicatat dan dikomentasikan sebagai bahan analisis dalam penelitian.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi mengacu pada pengelolaan informasi tertulis, visual, maupun audio. Dalam metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait PKH, seperti laporan tahunan. Maksud peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk membuat gambaran tentang strategi dan hasil yang telah dicapai dalam pengelolaan PKH.

**Tabel 1. 3 Narasumber Program Keluarga Harapan (PKH)**

No	Narasumber	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinsos P3AKB Kabupaten Pati.	Narasumber 1
2.	Koordinator Kabupaten Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pati.	Narasumber 2
3.	Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH).	Narasumber 3
4.	Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH).	Narasumber 4
5.	Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH).	Narasumber 5
6.	Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH).	Narasumber 6

#### 1.9.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data digunakan untuk menyampaikan solusi permasalahan penelitian yang dihadapi. Teknik analisis data dimulai dengan mengkaji secara teliti

semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian, data mentah harus dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan dan dianalisis. Braun & Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau tema yang relevan dari data yang telah dikumpulkan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam analisis data kualitatif. Langkah ini sangat penting karena bertujuan untuk mempersempit, mengelompokkan, memperjelas, dan mengutamakan topik penelitian. Data yang tidak relevan atau tidak penting dihilangkan selama proses reduksi data, dan data yang ada dikelompokkan sehingga dapat dipahami dengan baik dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data mengacu pada pengorganisasian informasi menjadi narasi yang lengkap dan rinci dengan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Penyajian data terdiri dari berbagai elemen seperti matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya untuk tujuan penyajian data.

### 3. Kesimpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan merupakan proses penafsiran dan interpretasi data. Proses ini merupakan komponen penting dari struktur penelitian secara keseluruhan. Selama penelitian berlangsung,

kesimpulan harus diverifikasi untuk menjamin keberlanjutan dan kepercayaan dalam hasil penelitian. Sehingga validitas data dapat dipertanggungjawabkan, kesimpulan data yang ditemukan harus selalu diuji untuk kebenaran dan relevansi.